

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Sukoharjo:

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK di Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan oleh instansi terkait namun ada beberapa program dari beberapa pilar dalam RUNK yang belum terlaksana karena bukan merupakan wewenang dari dinas atau instansi terkait di Kabupaten Sukoharjo dan merupakan wewenang dari dinas atau instansi di Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035 mencapai 84,1% berkategori sangat baik dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 17,7% ; Pilar-2 sebesar 18,7%; Pilar-3 sebesar 16,8%; Pilar-4 sebesar 17,4%; dan Pilar-5 sebesar 13,5%.
2. Tingkat kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo mencapai 141,11 setiap 100.000/penduduk dan 15,96 per 10.000/kendaraan. Tingkat fatalitas kecelakaan mencapai 12%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja RUNK di Kabupaten Sukoharjo sudah banyak tercapai namun belum dapat mencapai target penurunan kecelakaan di RUNK sehingga perlu adanya analisis dan penanganan di lokasi rawan kecelakaan.
3. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 4 metode penentuan LRK dan perangkaan LRK tiap status jalan dari 167 ruas jalan terdapat 3 jalan yang merupakan blackspot tertinggi yaitu Jalan Kartasura – Bts Kota Surakarta untuk jalan nasional, Jalan Sukoharjo - Wonogiri untuk jalan provinsi, dan Jalan Pajang – Parangtejo untuk jalan kabupaten yang selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut mengenai perencanaan perbaikan.

## **B. Saran**

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kabupaten Sukoharjo diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya forum sebagai pengenalan RUNK ke berbagai instansi terutama terkait pembahasan mengenai 5 Pilar agar tiap - tiap stakeholder saling berkoordinasi dan paham akan peran dan tanggungjawab guna meningkatkan program – program keselamatan agar target pencapaian RUNK tercapai.
2. Perlu adanya pelaksanaan terkait program – program RUNK yang belum terlaksana serta mengoptimalkan pelaksanaan program RUNK yang telah terlaksana. Selain itu,perlu adanya evaluasi dalam setiap berbagai capaian atau kegiatan kinerja RUNK guna menjadi acuan untuk membentuk peningkatan program – program keselamatan yang dinilai masih belum optimal.
3. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan serta bahaya sisi jalan guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. 2018. Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka. Kabupaten Sukoharjo : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. Manajemen Proyek Pelaksanaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
- Kementrian Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat Sungai/Danau Feri/Penyebrangan Laut Dan Udara. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Jakarta : Sekretariat Negara.

Kementrian Perhubungan. 2018. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Marka Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.

Kementerian Pekerjaan Umum. Desain Perkerasan Jalan Lentur. Jakarta : Sekretariat Negara.

Kementrian Kesehatan. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Jakarta : Sekretariat Negara.

Kementrian Kesehatan. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/Sk/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Jakarta : Sekretariat Negara.

Kementrian Pekerjaan Umum 2010. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Persyaratan Laik Fungsi Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2012. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Jakarta : Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 2012. Keputusan Gubernur Kabupaten Sukoharjo Nomor 350/37 Tahun 2012 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Sukoharjo. Jawa Tengah : Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 2012. Keputusan Gubernur Kabupaten Sukoharjo Nomor 620 / 2 / Tahun 2016 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Sukoharjo. Jawa Tengah : Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 2019. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Nomor 173.2/389/2019 Tentang Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum Orang Dalam Kabupaten Dengan Pelayanan Terbaik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019. Jawa Tengah : Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 - 2018. Kabupaten Sukoharjo : Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 - 2018. Kabupaten Sukoharjo : Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 2018. Peraturan Gubernur Kabupaten Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Di Wilayah Operasi Dalam Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo : Sekretariat Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035. Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1964. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1964. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.